

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

##### A.1. Pengertian Anak

Setiap negara memiliki definisi yang tidak sama tentang anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau KHA menerapkan definisi anak sebagai berikut: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal". Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>19</sup>

Ditinjau dari pengertian anak diatas, terdapat beberapa pengertian anak menurut perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut karena secara umum yang kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin. Di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>19</sup> Maidin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama

## A.2. Pengertian Juvenile Delinquency

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan juvenile delinquency adalah:<sup>20</sup> Perilaku jahat/ dursila, atau kejahatan/ kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Apabila ditinjau menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah:

1. anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenakalan anak atau kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa dan kenakalan yang merupakan tindak pidana. Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Juvenile Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

---

<sup>20</sup>Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Bandung, P.T. Alumni, 2010, hal 111

Ditinjau dari dari pengertian pendapat ahli tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur Juvenile Delinquency adalah:

1. Adanya suatu tindakan atau perbuatan;
2. Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum;
3. Dirasakan atau ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang tercela;
4. Dilakukan oleh anak-anak.

Terdapat suatu maksud oleh pembuat undang- undang yang ingin mengelaborasi definisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang – undang sistem peradilan pidana anak terdapat istilah –istilah baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam undang – undang pengadilan anak, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- c. Istilah anak nakal yang terdapat dalam undang – undang pengadilan anak, dalam undang – undang sistem peradilan pidana anak tidak digunakan lagi. Peristilahan di sesuaikan dengan undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, istilah anak nakal diganti menjadi anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut pendapat penulis anak nakal bukanlah untuk dihukum melainkan diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak berhadapan dengan hukum merupakan situasi yang sulit karena secara fisik dan mental belum

---

<sup>21</sup>Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, Hal. 166

sempurna oleh karena itu hendaknya anak yang nakal tidak langsung dihukum bahkan dimasukan penjara. Berdasarkan UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak bahwa ada perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan anak nakal sekarang menjadi anak berhadapan dengan hukum.

### **A.3. Pemidanaan Anak**

#### **A.3.1. Sanksi Pidana**

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP , hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.<sup>22</sup>

Tetapi di dalam Undang – Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP itu namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim perlu mengetahui beberapa teori penjatuhan sanksi pidana. Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:<sup>23</sup>

1. Teori *retributive*, teori dikenal juga dengan teori absolute/ teorou pembalasan. Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pemidanaan menurut mereka yang menganut aliran teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal 47

<sup>23</sup> Walyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 1991, hal 17

2. Teori *utilitarian*, teori ini disebut juga dengan teori relative/ teori tujuan. Menurut pandangan teori ini, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan jangan semata – mata dilihat sebagai pembalasan belaka seperti dalam teori *retributive*, melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat dasar pembenaran pemidanaan itu ke depan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang.
3. Teori *integratif*, teori ini dikenal sebagai teori gabungan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar itu kemudian baru ditetapkan cara, sarana, atau tindakan apa yang akan digunakan.

Ditinjau dari teori tersebut bahwa dalam sebuah putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Mlg, pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan sanksi pemidanaan harus merujuk pada ketiga teori diatas, namun dalam hal putusan yang dikaji oleh penulis hakim teori yang paling tepat adalah utilitarian karena melihat dari pada terdakwa merupakan golongan anak maka sudah seyogyanya menurut pandangan teori tersebut pemidanaan itu harus dilihat dari manfaatnya di masa yang akan datang.

### **A.3.2. Sanksi Tindakan**

Jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali,
- b. Penyerahan kepada seseorang,
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa,
- d. Perawatan di LPKS,
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- f. Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau

g. Perbaikan akibat tindak pidana.<sup>24</sup>

Menurut pandangan penulis, selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan.

Penjatuan Pidana oleh Hakim dilakukan kepada anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Namun terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Hakim menjatuhkan tindak pidana pokok dan atau pidana tambahan atau tindakan.<sup>25</sup>

Dalam segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah melampaui umur di atas 12 (dua belas) sampai (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu dilakukan mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

## **B. Teori Kedudukan Anak di Mata Hukum**

Batasan tentang anak biasanya mendasarkan diri pada tingkatan usia. Secara normatif, dalam hukum positif Indonesia, batasan tentang anak dapat dilihat pada:

---

<sup>24</sup>Wigiati Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Bandung, P.T.Refika Aditama, hal 45

<sup>25</sup>*Ibid*, hal 65

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),

Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (*venia aetatis*, Pasal 419 KUHPer) Pasal ini senada dengan Pasal 1 Angka 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal :Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, yaitu : Pasal 45 berbunyi : Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada Pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 KUHP dan perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum anak yang bersalah itu.<sup>26</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a,b dan c UU 12/1995 bahwa anak didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum

---

<sup>26</sup> Dengan berlakunya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Maka pasal 45, 46, dan 47 KUHP sudah tidak berlaku (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>27</sup>

Ditinjau dari kedudukannya anak di mata hukum, bahwa anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dengan orang dewasa dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam, dan hukum. Apabila ditinjau dari hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*Minderjarig atau Person Under Age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*Minderjarig Heid atau Inferiority*) ataubiasa disebut juga sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*Minderjarig Under Voordy*).

### **B.1. Kaitan Antara Perlindungan Anak terhadap Hukum Positif di Indonesia**

Perlindungan Hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
- d. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya)
- e. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
- f. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata
- g. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Leden Marpaung, *Perlindungan anak berhadapan dengan hukum*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hal 12



Ditinjau dari pendapat diatas perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Dalam asas peradilan pidana anak menurut Undang – Undang No. 11 tahun 2012 perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.” Berdasarkan rumusan yang ada maka delik *strafbaar feit* memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia ,
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup>

## **B.2. Peradilan Pidana Anak Dalam Negara Hukum**

---

<sup>28</sup>*Ibid.* Hal 8

<sup>29</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* ,edisi revisi cet , Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2012 ,hal 48

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya.

Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, masih tetap diandalkan sebagai "kutup penekan" atau "*pressure valve*" atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat atau pelanggaran ketertiban umum. Peradilan juga masih tetap diharapkan berperan sebagai "*the last resort*" yakni sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).

Kedudukan dan keberadaan peradilan sebagai "*pressure valve*" dan "*the last resort*" peradilan masih tetap diakui memegang peran, fungsi dan kewenangan sebagai:<sup>30</sup>

1. Penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom of society*).
2. Dianggap sebagai wali masyarakat (*are regarding as custodian of society*).
3. Dianggap sebagai pelaksana penegak hukum yang lazim disebut dengan ungkapan "*judiciary as the upholders of the rule of law*".

Kedudukan dan keberadaan peradilan sebagai "*pressure valve*" dan "*the last resort*" peradilan masih tetap diakui memegang peran, fungsi dan kewenangan sebagai:

1. Penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom of society*).

---

<sup>30</sup>*Ibid*, Hal 9

2. Dianggap sebagai wali masyarakat (*are regarding as custodian of society*).
3. Dianggap sebagai pelaksana penegak hukum yang lazim disebut dengan ungkapan "*judiciary as the upholders of the rule of law*".

Menurut pendapat penulis di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan khusus. Peradilan anak masih berada dibawah peradilan umum. Secara interen di lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan.

Dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, landasan kerangka hukum Indonesia. Pasal 10 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, meliputi badan peradilan dalam lingkungan, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>31</sup>

### **B.3. Pertanggungjawaban Pidana Anak**

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Syarat pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan

---

<sup>31</sup>Lihat Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak; syarat yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak.<sup>32</sup>

Ditinjau teori tersebut Kebijakan penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menunjukan adanya kecenderungan bersifat meragikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan dapat disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif bagi anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.

Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>33</sup> Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Sementara itu Schaffmeister mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.<sup>34</sup>

Di tinjau dari perbandingan dua teori tersebut dalam hal ini sekalipun tidak menggunakan istilah kesalahan, namun tindakan tercela pada umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan dan orang tersebut harus mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatannya. Menurut sistem tindak pidana anak, di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan khusus. Peradilan anak masih berada dibawah peradilan umum. Secara

---

<sup>32</sup>Op, Cit, Hal 47

<sup>33</sup>Ibid hal, 56

<sup>34</sup>D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty. 1995, hal. 27

interen di lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:

1) Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporai*);
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gau, idiot, imbecile*, dan sebagainya); dan
- c. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), nyidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain di dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

- b. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- c. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan

d. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>35</sup>

Ditinjau dari Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Malang, Terdakwa rengga bersama teman-temannya secara keadaan jiwa dan kemampuan jiwanya adalah sehat jasmani dan rohaninya sehingga sudah sepatutnya ia harus mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Akan tetapi, terdakwa merupakan seorang anak yang belum dewasa dan dalam persidangan terdakwa sangat kooperatif dan mengakui atas perbuatannya sehingga sanksi yang dibebankan oleh terdakwa tidak harus sanksi pidana akan tetapi dapat juga sanksi tindakan karena pidana merupakan obat terakhir.

#### **B.4. Kewajiban Hakim Anak**

Kewajiban Hakim Anak yang mendasar adalah memberi keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Hakim wajib mempertimbangkan menyongsong masa depannya. Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Menurut pendapat penulis, hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil merupakan kepentingan terbaik untuk anak dikarenakan putusan hakim tersebut akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan bahwa putusan tersebut mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

---

<sup>35</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit.* hal 76.

<sup>36</sup> Bambang Waluyo. 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 115

Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman antara lain:<sup>37</sup>

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan - bedakan orang (Pasal 5 ayat (1)).
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2)).
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 14 ayat (1)).
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabila diminta (pasal 25)
5. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1)).

Peranan Hakim Anak tidak berbeda dengan peranan hakim pada umumnya dan peranan hakim sendiri tidak dapat dipisahkan dari peranan pengadilan yaitu wajib memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dimana pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Pada proses pemeriksaan, ketentuan Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara Pengadilan Anak kecuali jika ditentukan lain (Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Anak). Dengan berlakunya Undang-Undang Pengadilan Anak, maka hubungannya dengan KUHAP dan KUHP merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum. Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sedangkan KUHAP dan KUHP merupakan hukum umum (*lex generalis*). Sebagai hukum khusus, Undang-Undang Pengadilan Anak di dalamnya telah mengatur secara khusus tentang hukum acara dari tingkat penyidikan sampai dengan bagaimana cara pemeriksaan di muka pengadilan. Selain itu, Undang-Undang Pengadilan Anak juga mengatur secara khusus tentang ketentuan pidana materil yang ternyata telah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP (Pasal 67 Undang-Undang Pengadilan Anak).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 106

<sup>38</sup> Wahyu Affandi, 1984, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, Hal. 12.

Ditinjau dari UU Dalam melaksanakan proses pemeriksaan, hakim diharapkan mampu berkomunikasi dengan anak secara lembut bukan malah dengan suara yang keras dan terkesan mendesak atau menekan anak namun mampu menyesuaikan diri dengan kondisi psikologis anak Selanjutnya, putusan hakim yang dijatuhkan akan mempengaruhi akibat terhadap kehidupan si anak oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil merupakan yang terbaik bagi anak.

#### **B.5. Asas-Asas Dalam Peradilan Anak**

Kompetensi absolut Pengadilan Anak pada Badan Peradilan Umum, artinya bahwa pada pengadilan anak itu adalah bagian dari Badan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa perkara anak dan bermuara pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, sedangkan kompetensi relatif Pengadilan Anak adalah sesuai dengan tempat kejadian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam Undang-Undang pengadilan Anak dalam pasal-pasalnya menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

1. Pembatasan umur.  
Orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997).
2. Ruang lingkup masalah dibatasi.  
Masalah yang diperiksa dipengadilan anak hanyalah menyangkut perkara anak. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana anak saja, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang pengadilan anak, (Pasal 21 UU No. 3 Tahun 1997).
3. Ditangani pejabat khusus.



Perkara anak nakal ditangani pejabat khusus, yaitu penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak.

4. Peran pembimbing kemasyarakatan.
5. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan.  
Pemeriksaan perkara di pengadilan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, sehingga penuntut umum, penasehat hukum dan hakim tidak menggunakan toga.
6. Keharusan *split sing*.  
Anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer.
7. Acara pemeriksaan tertutup.  
Acara pemeriksaan perkara anak dilakukan tertutup untuk umum dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka, (Pasal 153 KUHAP dan Pasal 57 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997).
8. Diperiksa oleh hakim tunggal.  
Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan anak, baik di tingkat pertama, banding dan kasasi dilakukan dengan hakim tunggal. Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit maka berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997, perkara diperiksa dengan hakim majelis.
9. Masa penahanan lebih singkat.  
Masa penahanan terhadap anak lebih singkat yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 dibandingkan dengan masa penahanan dalam KUHAP. Hal ini memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang begitu lama tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak.
10. Hukuman lebih ringan.  
Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak berhadapan dengan hukum atau yang melakukan tindak pidana lebih ringan dari pada yang ditentukan dari KUHAP. Bahkan hakim dalam pengadilan anak harus jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Ditinjau perihal anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi tindak pidana korban, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam rumusan pasal 1 UU No 11 tahun 2011 tentang sistem peradilan anak dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak berhadapan dengan hukum adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Anak yang menjadi korban tindak pidana

selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi disebabkan karena tindak pidana.<sup>39</sup>

### **C. Asas *Ultimum Remidium* Dalam Peradilan Anak**

Asas *Ultimum Remidium* dalam peradilan anak tidak terlepas dari peranan hakim anak dalam mengadili perkara anak. Peranan hakim dalam peradilan anak sangat penting karena vonis dari hakim apakah akan menjatuhkan pidana (*straf*) atau memberikan tindakan (*maatregel*) menjadi hal yang penting.

Dalam Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ini telah diatur juga tentang beberapa syarat dan ketentuan hakim anak. Menurut pasal 10, salah satu syarat untuk diangkat menjadi hakim anak adalah mempunyai minat perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Persyaratan sedemikian, mencerminkan adanya unsur perlindungan terhadap anak. Diharapkan Hakim Anak yang mengadili anak nakal dalam memberikan keputusannya, memutus dengan lebih mengedepankan dan melindungi kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Menurut Hadi Supeno terkait dengan pembedaan terhadap anak menyatakan bahwa:<sup>40</sup>

“Pembedaan dalam peradilan anak adalah merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*), dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya tetapi sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan sosialnya, semestinya pembedaan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir”.

---

<sup>39</sup>Lihat UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak

<sup>40</sup>Arief Gosita, 2001, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, Hal 23

Ditinjau dari putusan yang dikaji oleh penulis terdakwa rengga melakukan sebuah tindak pidana pada sesungguhnya merupakan dorongan dari orang-orang terdekat yakni teman sepermainannya atau lingkungan sekitarnya, oleh karena itu maka sudah seyogyanya bahwa pemidanaan yang disematkan oleh terdakwa harus dilakukan sebagai langkah upaya terakhir.

Menurut Labeling theory, kenakalan anak dapat muncul karena adanya stigma "nakal" dari orang tua, tetangga, teman sepergaulan, saudara, guru, atau masyarakatnya, bahkan putusan pengadilan.

Berkaitan dengan ini ada 3 proposisi teori labeling yang dapat dikaitkan dengan penerapan sistem peradilan terhadap anak nakal, yaitu:<sup>41</sup>

1. Seseorang menjadi penjahat bukan karena melanggar peraturan perundang-undangan, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa;
2. Tindakan penangkapan merupakan langkah awal dari proses labeling;
3. Labeling merupakan suatu proses yang melakukan identifikasi dengan citra sebagai devian dan subkultur serta menghasilkan rejection of the rejector.

Ditinjau dari teori Labeling diatas dalam pemberian status "tahanan anak", "tersangka anak", "terdakwa anak", "anak pidana", atau "anak negara" melalui sistem peradilan anak dapat menjadi label bagi anak. Label tersebut dapat mengakibatkan kenakalan anak yang bersangkutan pada masa yang akan datang. Kenakalan anak yang muncul setelah anak diberi label oleh negara sebagai "anak nakal" merupakan *secondary deviant*. Penjatuhan pidana penjara yang kurang selektif atau mengabaikan asas subsidiaritas (*ultimum remedium*) bertentangan

---

<sup>41</sup>*Ibid*, Hal 24

dengan ketentuan-ketentuan dalam *The Riyadh Guidelines* yang menyatakan bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa orang tua anak tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan. Juga harus dipertimbangkan tentang kondisi fisik dan psikologis anak, tempat atau lokasi perbuatan pidana tersebut dilakukan. Selain itu dipertimbangkan juga tentang perbuatan pidana tersebut dapat membahayakan orang tua anak, dan atau membahayakan anak nakal. Sebenarnya masih banyak jenis tindakan yang dapat diberikan agar anak nakal terhindar dari sanksi yang bersifat institusionalisasi.

#### **D. Teori Putusan Hakim**

##### **D.1. Pengertian Putusan**

Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).

Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*)<sup>42</sup> Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, menghukum sesuatu.

Ditinjau dari teori di atas dalam diktum vonis selalu bersifat *condemnation* (menghukum), atau bersifat *constitutoir* (menciptakan). Perintah dari peradilan ini jika tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka dapat dilaksanakan secara paksa yang bisa disebut eksekusi.

---

<sup>42</sup>Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal 200.

## D.2. Macam-Macam Putusan

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 HIR, Pasal 196 RBG, dan Pasal 46-68 Rv. Tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG yang mengatur putusan provisi maka berdasarkan pasal-pasal yang disebut diatas, dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dapat dijataukan hakim:

- a. Putusan *Declaratoir* (pernyataan)  
Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah.
- b. Putusan *Constitutif* (pengaturan)  
Putusan *constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menstatatkan seseorang jatuh pailit.
- c. Putusan *Condemnatoir* (menghukum)  
Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum, atau dengan kata lain, putusan menjatuhkan hukuman. misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran utangnya.
- d. Putusan *Preparatoir*  
Putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya: putusan yang untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi, putusan yang memerintahkan pihak yang diwakili oleh kuasanya untuk datang sendiri.
- e. Putusan Kontradiktoir  
Putusan kontradiktoir adalah putusan yang diambil dari tergugat yang pernah datang menghadap di persidangan, tetapi pada hari-hari sidang berikutnya tidak datang maka perkaranya diperiksa secara kontradiktor, kemudian diputuskannya. Artinya, diputus di luar hadirnya salah satu pihak yang berperkara.
- f. Putusan *Verstek*  
Putusan *verstek* adalah putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau “*verstek*”, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

g. Putusan Akhir

Setelah hakim selesai memeriksa perkara dan tidak ada lagi hal hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan, maka hakim menjatukan putusan terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.<sup>43</sup>

Di tinjau dari penjelasan pasal UU No 3 tahun 2006 putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Berbeda dengan penetapan yang diambil oleh hakim apabila perkaranya adalah permohonan di mana kekuatan penetapannya bersifat *deklaratoir*, putusan diambil oleh hakim apabila perkaranya berupa suatu sengketa di mana para pihak saling mempertahankan hak masing-masing. Jadi perkaranya diperiksa secara *contradictoir* (timbang balik), sehingga putusannya bersifat *condemnatoir* (menghukum) pihak yang kalah.

## E. Pertimbangan Hakim

### E.1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo at bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 308.

<sup>44</sup>Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.140.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>45</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Ditinjau dari beberapa teori pertimbangan hakim Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo at bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Selain itu pula dalam pertimbangan hakim dalam putusan

---

<sup>45</sup>*Ibid.* Hal.141

<sup>46</sup>*Ibid.* Hal.143

yang dikaji oleh penulis terdakwa tidak pernah menyangkal dalam setiap fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.

## **E.2. Dasar Pertimbangan Hukum**

Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana khususnya terhadap anak, tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya mengingat sifat - sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk oleh karena itu perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Secara yuridis, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan terdakwalah yang



bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah :<sup>47</sup>

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan jugasangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat - sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

Berkaitan dengan penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya dengan adanya kesepakatan bersama dalam penanganan penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 22 Desember 2009, antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung Tentang Penanganan Anak

---

<sup>47</sup>Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1998, Hal. 11

Yang 6 Berhadapan Dengan Hukum. Adapun Surat Keputusan Bersama (SKB)

tersebut menyatakan:

- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa berhak memperoleh perlindungan baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar termasuk anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum oleh aparat penegak hukum belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam peraturan perlingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa untuk meningkatkan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu kerja sama yang terpadu antar penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu untuk pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak;
- d. Bahwa pendekatan keadilan restoratif perlu dijadikan sebagai landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.<sup>48</sup>

Ditinjau dari teori tersebut salah satu aspek yang terkait peranan hakim dalam peradilan pidana adalah terkait dengan jenis - jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Untuk itu hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor - faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini hakim harus benar- benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang - wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

---

<sup>48</sup> Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 22 Desember 2009 *Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*.